



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SALATIGA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SALATIGA
NOMOR 23 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SALATIGA TAHUN 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SALATIGA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan Reformasi Birokrasi sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024, KPU Kota Salatiga telah menetapkan Keputusan KPU Kota Salatiga tentang Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan KPU Kota Salatiga;
 - b. bahwa untuk mensukseskan pelaksanaan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga perlu disusun Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga tentang Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga Tahun 2022;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga Nomor 1/HK.03.1/3373/2022 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga Tahun 2022 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga Nomor 17 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga Nomor 1/HK.03.1/3373/2022 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga Tahun 2022;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SALATIGA TENTANG RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SALATIGA TAHUN 2022.**
- KESATU** : Menetapkan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Rencana Aksi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan panduan dalam melaksanakan penyusunan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi

program, kebijakan, dan kegiatan Reformasi Birokrasi
Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga Tahun 2022.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan
Keputusan ini dibebankan pada DIPA Bagian
Anggaran 076 Tahun 2022 Nomor SP DIPA-
076.01.2.657558/2022 di Komisi Pemilihan Umum
Kota Salatiga.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salatiga

Pada tanggal 8 Agustus 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SALATIGA,

ttd

SYAEMURI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SALATIGA
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM DAN SDM



DANTI MARTIANA

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA SALATIGA
 NOMOR 23 TAHUN 2022
 TENTANG
 RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI DI
 LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
 SALATIGA TAHUN 2022

**RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI TAHUN 2022
 DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SALATIGA**

NO	AREA PERUBAHAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												KET	
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	Manajemen Perubahan	1. Perencanaan Reformasi Birokrasi	Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi (RB) di lingkungan KPU Kota Salatiga	SK Tim Reformasi Birokrasi (RB) di lingkungan KPU Kota Salatiga	√													
			Pembangunan komitmen bersama antara Komisioner, PNS, dan PPNPN KPU Kota Salatiga untuk melaksanakan reformasi birokrasi secara konsisten dan melakukan perubahan mental	Kegiatan kick off/ pembangunan komitmen pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan KPU Kota Salatiga			√											

			FGD penyusunan rencana aksi RB di lingkungan KPU Kota Salatiga	Tersusunnya rencana aksi RB di lingkungan KPU Kota Salatiga	√														
		2. Pelaksanaan Manajemen Perubahan	Sosialisasi reformasi birokrasi melalui berbagai media	Tersedianya media sosialisasi RB di lingkungan kerja yang bisa diakses stakeholder internal dan eksternal	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
			Sosialisasi nilai-nilai untuk menegakan integritas penyelenggara pemilu dan ASN	Menurunnya jumlah pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
				Menurunnya angka pelanggaran disiplin ASN	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
				Penandatanganan Pakta Integritas	Dokumen pakta integritas yang ditandatangani seluruh PNS Sekretariat KPU Kota Salatiga	√													
				Pelaporan LHKPN dan LHKASN	Bukti lapor LHKPN dan LHKASN														√
2	Penataan Peraturan Perundang-undangan/ Deregulasi Kebijakan	1. Evaluasi secara berkala naskah dinas pengaturan dan penetapan yang menjadi kewenangan KPU Kota Salatiga	Pemetaan naskah dinas pengaturan dan penetapan di lingkungan KPU Kota Salatiga	Adanya data naskah dinas pengaturan dan penetapan di lingkungan KPU Kota Salatiga	√														

		2. Menyempurnakan/ mengubah berbagai naskah dinas pengaturan dan penetapan yang dipandang tumpang tindih dan tidak relevan lagi	Penyusunan revisi naskah dinas pengaturan dan penetapan di lingkungan KPU Kota Salatiga	Jumlah naskah dinas pengaturan dan penetapan yang sudah direvisi	√														
		3. Pengelolaan JDIH	Pembangunan JDIH	JDIH dapat diakses	√														
			Pengelolaan JDIH	Updatenya data JDIH	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
3	Penataan Kelembagaan	1. Evaluasi organisasi	FGD evaluasi organisasi di lingkungan KPU Kota Salatiga	Dokumentasi FGD evaluasi organisasi di lingkungan KPU Kota Salatiga														√	
		2. Penyesuaian SOTK	Dilaksanakan penyesuaian SOTK sesuai dengan PKPU 14 Tahun 2020	SOTK sesuai dengan PKPU 14 Tahun 2020						√									
			Pembuatan dokumen struktur organisasi KPU Kota Salatiga	Tersedianya struktur organisasi KPU Kota Salatiga						√									
4	Penataan Tata Laksana	1. Peningkatan tatalaksana proses bisnis serta SOP di lingkungan KPU Kota Salatiga	Penyusunan peta proses bisnis dan SOP di lingkungan KPU Kota Salatiga	Tersedianya peta proses bisnis yang sesuai dengan tugas dan fungsi	√														

	2. Penyelenggaraan keterbukaan informasi publik	Tata kelola informasi dan dokumentasi di lingkungan KPU Kota Salatiga	Adanya kebijakan pendukung pengelolaan informasi dan dokumentasi	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
			Dapat diaksesnya SOP terkait permohonan informasi oleh stakeholder	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
			Meningkatnya kepuasan layanan terkait permohonan informasi	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
			Jumlah permohonan masuk, sedang diproses, dan sudah selesai ditindaklanjuti	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
			Indeks kepuasan pemohon informasi											√	
	3. Tata kelola dan implementasi sistem pemerintah berbasis elektronik (SPBE) di lingkungan KPU Kota Salatiga	Tata kelola SPBE di lingkungan KPU Kota Salatiga	Jumlah aplikasi terintegrasi yang dimanfaatkan (SAKTI)	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
			Jumlah aplikasi berbagi pakai yang dimanfaatkan (LPSE)												
		Pemanfaatan aplikasi SPBE administrasi kesekretariatan	Terisinya data pada aplikasi kepegawaian (MySAPK)	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
			Terisinya data pada aplikasi keuangan (SIMONIKA)	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	

		Pemanfaatan aplikasi SPBE pelayanan publik	Layanan pengaduan publik	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√			
			Layanan dokumentasi dan informasi hukum	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√		
			Layanan informasi dan dokumentasi	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√		
		4. Penerapan sistem kearsipan yang handal	Penerapan sistem arsip	Terkelolanya arsip statis dan dinamis di lingkungan KPU Kota Salatiga	√														
		Kerjasama dengan arsip daerah	Terdokumentasinya arsip vital	√															
5	Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia	Pembangunan sistem merit	Penerapan pengukuran kinerja individu	Seluruh pegawai memiliki sasaran kinerja pegawai	√														
			Seluruh pegawai memahami indikator keberhasilan dari tugas dan jabatan	√															
			Sasaran kinerja pegawai mendukung sasaran strategis dan pencapaian kinerja berjenjang/cascading	√															
			Pengukuran periodik sasaran kinerja individu	√															
			Penerapan <i>assessment</i> untuk pertimbangan	Data mutasi	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
		Data promosi																	

			pengembangan karir dan mutasi pegawai	Data peserta <i>assessment</i>														
			Penerapan disiplin dan kode etik penyelenggara pemilu	Jumlah pelanggaran tahun sebelumnya	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
				Jumlah pelanggaran tahun ini	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
				Jumlah pelanggaran yang sudah diberikan sanksi/hukuman	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
			Pengembangan pegawai berbasis kompetensi	Adanya identifikasi kebutuhan kompetensi di lingkungan KPU Kota Salatiga	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
				Jumlah pegawai yang mengikuti pengembangan kompetensi														
			Implementasi standar kompetensi jabatan	Setiap jabatan sudah memiliki standar kompetensi jabatan	√													
			Pengisian sistem informasi kepegawaian	Data kepegawaian yang mutakhir di lingkungan unit/satuan kerja	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
6	Penguatan Akuntabilitas	1. Penguatan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	Penyusunan dan penetapan Renstra KPU Kota Salatiga	Renstra KPU Kota Salatiga	√													
			Penetapan kinerja dengan menerapkan <i>reward and</i>	Adanya dokumen penetapan kinerja	√													

			<i>punishment</i>																	
			Penyelenggaraan anggaran yang efektif dan efisien	Adanya program dan kegiatan	√															
				Persentase sasaran kinerja yang tercapai	√															
				Persentase anggaran yang berhasil difocussing untuk mendukung tercapainya kinerja utama organisasi	√															
			Pemanfaatan aplikasi terintegrasi untuk menciptakan efektifitas dan efisiensi anggaran	Adanya aplikasi terintegrasi telah dimanfaatkan untuk menciptakan efektifitas dan efisiensi anggaran	√															
			Pengukuran Capaian Kinerja KPU Kota Salatiga	Persentase Capaian Kinerja KPU Kota Salatiga	√															
			Evaluasi Capaian Kinerja KPU Kota Salatiga	Adanya rencana tindak lanjut dan pelaksanaan tindak lanjut atas evaluasi Capaian Kinerja KPU Kota Salatiga	√															
			Pelaporan Kinerja KPU Kota Salatiga	Pelaporan Kinerja KPU Kota Salatiga tepat waktu	√															

		2. Pengelolaan akuntabilitas kinerja	Pemutakhiran data kinerja di aplikasi e-Lapkin	Terisinya aplikasi e-Lapkin	√															
				Data e-Lapkin KPU Kota Salatiga termutakhir	√															
			Pelatihan SDM pengelola akuntabilitas kinerja	Jumlah pegawai pengelola akuntabilitas kinerja yang memperoleh pelatihan	√															
7	Penguatan Pengawasan	1. Pelaksanaan pengendalian gratifikasi	Pembentukan Unit Pengendali Gratifikasi (UPG)	SK Unit Pengendali Gratifikasi (UPG)	√															
			<i>Public campaign</i> anti gratifikasi	Adanya alat sosialisasi anti gratifikasi kepada <i>stakeholder</i> eksternal	√															
		2. Peningkatan SPIP di lingkungan KPU Kota Salatiga	Pembangunan SPIP di lingkungan KPU Kota Salatiga	Adanya tim SPIP pada KPU Kota Salatiga	√															
			Pelaksanaan SPIP : a. Lingkungan pengendalian b. Penilaian risiko c. Kegiatan pengendalian d. Informasi dan komunikasi e. Pemantauan pengendalian intern	Terselenggaranya : a. Lingkungan pengendalian b. Penilaian risiko c. Kegiatan pengendalian d. Informasi dan komunikasi e. Pemantauan pengendalian intern	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√

			Monitoring, Evaluasi, Pelaporan dan Tindak Lanjut Pengelolaan SPIP	Pelaporan Buku Kendali tepat waktu	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√		
	3. Penanganan pengaduan masyarakat	Pembangunan Sistem Pengaduan masyarakat di Lingkungan KPU Kota Salatiga		Tersedianya sarana penyampaian pengaduan	√													
				Terdapat sistem mekanisme prosedur pengaduan	√													
				Terdapat jangka waktu penyelesaian pengaduan	√													
			Pengelolaan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan KPU Kota Salatiga		Prosentase Pengaduan Masyarakat selesai ditindaklanjuti	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
	4. Peningkatan Integritas Individu	Penyampaian LHKPN		100% seluruh wajib lapor LHKPN di lingkungan KPU Kota Salatiga													√	
		Penyampaian LHKASN		100% seluruh wajib lapor LHKASN di lingkungan KPU Kota Salatiga													√	

	Penguatan pelayanan prima di lingkungan KPU Kota Salatiga	Memetakan jenis-jenis/produk-produk pelayanan Administrasi Internal Kesekretariatan dan pelayanan eksternal (terkait Kepemiluan)	Informasi jenis-jenis atau produk-produk layanan di lingkungan KPU Kota Salatiga baik kepada internal dan eksternal	√																
	Mendorong Inovasi di sektor pelayanan pemilu dan administrasi di lingkungan KPU Kota Salatiga	Menerapkan Inovasi yang mendorong perbaikan pelayanan dalam hal: a. Kemudahan Sistem, Mekanisme, dan Prosedur b. Kecepatan Waktu Penyelesaian c. Kualitas Sarana dan prasarana d. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	a. Indeks Kepuasan layanan yang di dapat melalui survei pelayanan b. Adanya SOP Pelayanan c. Informasi jenis-jenis pelayanan di lingkungan KPU Kota Salatiga baik kepada internal dan eksternal d. Tersedianya pelayanan berbasis teknologi informasi	√																
		Melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap inovasi layanan	Adanya rekomendasi dan tindak lanjut hasil evaluasi																√	
				Dilaksanakannya rekomendasi hasil evaluasi																
	Penerapan partisipasi publik dalam	Pembangunan Kerja Sama	Adanya kerjasama dengan lembaga	√																

